



## **SIARAN PERS**

### **Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017**

**Kendari, Mei 2018**

Bertempat di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Pukul 11:00 WITA dilaksanakan kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017. Pada kesempatan kali ini Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Muna, Pemerintah Kabupaten Buton, Pemerintah Kabupaten Kolaka, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Pemerintah Kabupaten Bombana, Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Pemerintah Kota Kendari dan Pemerintah Kota Baubau

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Ir. Hermanto, M.Si. ditujukan kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah dari tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam sambutannya menyatakan bahwa secara umum pada hampir seluruh pemerintah daerah masih menjumpai permasalahan (1) Pengelolaan aset tetap yang belum optimal (2) Pengelolaan Dana BOS belum tertib (3) Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum tertib (4) Pengalihan Kewenangan atas Aset dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi Belum Tertib.

Dan atas seluruh pelaksanaan, capaian serta hal – hal yang menjadi kriteria penentuan opini atas laporan keuangan, kepada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau Tahun Anggaran 2017, BPK memberikan opini **“WAJAR TANPA PENGECUALIAN”**.

Lebih lanjut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mengingatkan baik kepada Kepala Daerah maupun Ketua DPRD untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 60 hari dari hari ini merupakan batas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2017. Kami mengharapkan capaian pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat ditingkatkan, para Kepala Daerah harus mendorong seluruh Pejabat pelaksana rekomendasi dan Inspektorat untuk mengoptimalkan Kebijakan Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang sedang dijalankan BPK. Karena tanpa optimalisasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, akan menjadi beban untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada waktu yang akan datang.

**BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara**

---

**Keterangan lebih lanjut:**

Nur Kurniawan, Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan  
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara  
Email : [stafhtukalansultra@gmail.com](mailto:stafhtukalansultra@gmail.com)